



PENGEMBANGAN PARIWISATA MELALUI *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DI KABUPATEN MAGELANG

Mochamad Hanafi

*Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
m.hanafi@uny.ac.id*

Abstrak: Pengembangan Pariwisata Melalui *Collaborative governance* di Kabupaten Magelang. Pariwisata merupakan salah satu sektor terbesar yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara cepat. Pariwisata merupakan salah satu sektor potensial yang perlu untuk dikembangkan termasuk di Magelang. *Collaborative governance* menjadi topik yang semakin penting dalam pengembangan pariwisata. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi proses dan factor keberhasilan *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata. Metode penelitian menggunakan studi literatur dan dianalisis dengan analisis content. Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* terselenggara dengan melihat aspek kepercayaan, komitmen, kepemimpinan, dan kelembagaan. Kepercayaan antar pihak terkait menjadi awal terbentuknya komitmen untuk melaksanakan kerjasama. Kepemimpinan diperlukan dalam proses kolaborasi. *Collaborative governance* diwujudkan dengan kelembagaan dalam pengelolaan pariwisata. Keberhasilan *collaborative governance* sangat dipengaruhi oleh regulasi, pemetaan dan peran *stakeholder*, serta komunikasi yang terjalin. Regulasi akan memudahkan penentuan *stakeholder* beserta perannya dan menciptakan komunikasi yang baik antar *stakeholder*.

Kata kunci: collaborative governance; pariwisata; proses; keberhasilan; magelang

Abstract: Tourism Development Through Collaborative governance in Magelang Regency. Tourism is one of the largest sectors that can increase economic growth rapidly. Tourism is one of the potential sectors that need to be developed, including in Magelang. Collaborative governance is becoming an increasingly important topic in tourism development. The purpose of this study is to identify the processes and success factors of collaborative governance in tourism development. The research method uses literature study and analyzed by content analysis. The findings in the study indicate that collaborative governance is implemented by looking at aspects of trust, commitment, leadership, and institutions. Trust between related parties is the beginning of the formation of a commitment to carry out cooperation. Leadership is needed in the collaborative process. Collaborative governance is realized through institutions in tourism management. The success of collaborative governance is strongly influenced by regulations, mapping and stakeholder roles, as well as communication. Regulations will facilitate the determination of stakeholder and their roles and create good communication between stakeholder.

Keyword: collaborative governance; tourism; process; success; magelang

History & License of Article Publication:

Received: 15/08/2020

Revision: 17/12/2020

Published: 28/02/2021

DOI: <https://doi.org/10.21831/efisiensi.v19i1.53447>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor terbesar yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara cepat. Pariwisata dapat memberikan pemasukan untuk negara, terlebih kepada pemerintah daerah. Akhir-akhir ini pariwisata menjadi kunci terhadap pertumbuhan global dan pengembangan maupun penciptaan lapangan pekerjaan. Potensi pariwisata yang dimiliki setiap daerah cukup beragam dari wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, dan sebagainya. Keberagaman potensi yang dimiliki daerah sehingga masing-masing daerah memiliki potensi wisata yang dapat digali serta dikelola dan dikembangkan untuk pariwisata.

Pariwisata merupakan salah satu sektor potensial yang perlu untuk dikembangkan. Pariwisata berpotensi menciptakan pertumbuhan ekonomi, diversifikasi ekonomi, mengurangi kemiskinan serta menciptakan hubungan timbal balik dengan sektor lainnya terutama sektor penyedia jasa (Iain T. Christie & D. Elizabeth Crompton., 2003). Sehingga dapat menunjukkan bahwa masing-masing daerah mempunyai berbagai potensi pariwisata yang dapat digali dan dikembangkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sarana hiburan serta terciptanya lapangan kerja masyarakat sekitar. Pariwisata dapat menyumbang penerimaan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak dan retribusi, serta devisa dari kunjungan wisatawan asing. Pariwisata juga dapat menumbuhkan perekonomian lokal sekitar destinasi wisata sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Pariwisata adalah sektor yang secara signifikan berdampak terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan (Iman Pribadi et al., 2021).

Pengembangan pariwisata ideal saat ini mengacu kepada Undang-Undang Kepariwisata yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, dan mempererat persahabatan antar bangsa (Indonesia, 2009). Pengembangan pariwisata yang diharapkan sesuai dengan undang-undang pariwisata yang mengacu pada konsep pariwisata berkelanjutan.

Collaborative governance menjadi topik yang semakin penting termasuk dalam pengembangan pariwisata. Pariwisata sangat dipengaruhi salah satunya oleh destinasi wisata. *Collaborative governance* menjadi topik yang semakin penting, termasuk dalam tata kelola destinasi wisata. menjadi tergantung dari kegiatan wisata yang akan dibangun (Borges et al., 2014; Pechlaner et al., 2010; Volgger & Pechlaner, 2015). Terdapat berbagai

pengaturan dalam prinsip-prinsip untuk tata kelola pariwisata (Stoffelen et al., 2017). Secara kelembagaan, telah dilakukan penelitian terhadap peran pemerintah dalam rangka kinerja ekonomi (Al-Najjar, 2014; Volgger & Pechlaner, 2014). Akan tetapi akhir-akhir ini perhatian terhadap aspek social dan lingkungan cukup meningkat (Bichler, 2021; Erkuş-Öztürk & Eraydin, 2010). Tata kelola pariwisata mengharuskan adanya adopsi pemahaman secara menyeluruh terkait faktor sosial yaitu partisipasi masyarakat dan kolaborasi antara pemangku kepentingan (Bichler, 2021; Nelson, 1998). Pada tingkat organisasi, secara signifikan jaringan *actor* berpengaruh terhadap tata kelola pariwisata (Baggio & Cooper, 2010; Beaumont & Dredge, 2010; van der Zee et al., 2017). Selain itu kolaborasi dan kerjasama menjadi aspek yang penting dalam mewujudkan tujuan pariwisata (Keyim, 2018).

Pengembangan pariwisata perlu memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ada sehingga tidak menimbulkan permasalahan. Baru-baru ini sebagai solusi untuk aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam tata kelola pariwisata yaitu pariwisata berkelanjutan (Alfiandri et al., 2021; Duadji & Tresiana, 2020; Robertson, 2011; Roxas et al., 2020). Proses kolaborasi pada sektor pariwisata telah diteliti tetapi mengabaikan faktor-faktor yang mendasarinya (Keyim, 2016; Selin, 2017). Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang sedang gencar untuk dikembangkan oleh berbagai daerah. Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten yang mengembangkan pariwisata dengan didukung adanya situs warisan cagar budaya dunia beserta destinasi pendukung di sekitarnya. Pengembangan pariwisata perlu dilakukan oleh untuk dapat meningkatkan perekonomian baik daerah maupun pusat. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui proses *collaborative governance* serta factor-faktor yang mempengaruhinya. Kerangka kerja Ansell dan Gash digunakan untuk identifikasi proses *collaborative governance* yang meliputi kepercayaan, komitmen, kepemimpinan, dan kelembagaan.

Governance bermaksud untuk pengaturan dan pengkoordinasian tujuan (Bramwell & Lane, 2011). Mengkoordinasikan pemangku kepentingan untuk perancangan dan pengembangan tujuan merupakan tujuan dari *governance* (Presenza et al., 2015). *Governance* berusaha untuk mewujudkan berbagai *actor* dapat berkolaborasi dan menyumbang terhadap pembuatan kebijakan dalam penerapan pembangunan berkelanjutan dengan komitmen, sinergi, dan kolaborasi yang berharga (Presenza et al., 2015). *Governance* berbicara tentang struktur dan proses yang bertujuan untuk mengetahui penyebab permasalahan pada desain kelembagaan, hubungan pribadi, dan pola kerjasama (Beritelli & Bieger, 2014). Dimensi partisipasi, legitimasi, transparansi, dan efisiensi merupakan hal penting dalam *good governance*, seperti penelitian yang telah dilakukan

(Pechlaner et al., 2010). Semua aktor baik publik maupun swasta harus dapat melaksanakan kerjasama dalam hal kekuatan, keahlian, dan sumberdaya untuk ketercapaian tata kelola. (Bramwell & Sharman, 1999; Hanafi, 2019; Valente et al., 2015). Akan tetapi, walaupun tata kelola pariwisata berfokus pada bisnis, *actor* pemerintah sering terlibat lebih banyak (Bichler, 2021; Bramwell, 2011).

Tata kelola yang baik dalam pariwisata sangat membutuhkan adanya kolaborasi berbagai *actor* karena industri pariwisata terdiri dari beragam *actor* yang dengan bersama menyediakan layanan pariwisata. Hal yang penting adalah mengelola hubungan antar pemangku kepentingan untuk peran dan keuntungan (Garrod et al., 2012; Wagner & Peters, 2009). Akan tetapi jika terjadi hambatan dalam kolaborasi antar *stakeholder* dapat menambah dana dan waktu (Fung, 2015; Garrod et al., 2012). Kolaborasi antar aktor sangat penting untuk tata kelola yang baik karena pariwisata dikenal mewakili industri yang terfragmentasi dengan beragam aktor yang bersama-sama menyediakan layanan pariwisata. Dalam konteks ini, mengelola hubungan dengan para pemangku kepentingan menjadi penting untuk memastikan legitimasi dan penerimaan. Namun, hubungan ini bisa mahal dan memakan waktu ketika hambatan yang luas dan berbagai untuk terlibat dengan para pemangku kepentingan ada. Penilaian factor pendorong dan penghambat akan diketahui dilihat dari proses dalam *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2007)

Penelitian *collaborative governance* telah dilakukan di bidang pariwisata, tetapi identifikasi proses dan keberhasilan dalam pengembangannya belum banyak dilakukan. Keberhasilan dan kesuksesan *collaborative governance* mengharuskan adanya kerjasama, koordinasi, dan kolaborasi serta peran dari manajer publik (Ansell & Gash, 2007; Robertson, 2011). Proses kolaborasi perlu memperhatikan faktor pembangunan kepercayaan, komitmen untuk memproses, pemahaman bersama tentang tujuan dan keyakinan strategis, perantara hasil, dan dialog tatap muka (Ansell & Gash, 2007). Kepemimpinan dan desain kelembagaan sangat dibutuhkan dalam pencapaian *collaborative governance* (Beritelli & Bieger, 2014; Fung, 2015; Pechlaner et al., 2014). Selain itu perlu dilakukan pembagian peran antar *actor* dalam penerapan *collaborative governance*. *Collaborative governance* sangat terstruktur dengan baik yang secara empiris Ansell dan Gash menyediakan panduan untuk analisis tata kelola. Sehingga menarik untuk meneliti pengembangan pariwisata melalui *collaborative governance* di Kabupaten Magelang untuk mengetahui proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi.

METODE

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengetahui fakta *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata di Magelang. Data yang digunakan bersumber dari wawancara, buku, artikel, majalah, dokumen, catatan sejarah, dan sebagainya. Objek pada penelitian ini adalah *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata. Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga ditarik suatu kesimpulan. Untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik triangulasi. Kemudian data dianalisis menggunakan teknik analisis taksonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kabupaten Magelang mengembangkan pariwisata dengan mengikutkan berbagai aktor. *Collaborative governance* secara strategis dilakukan melalui dimensi struktural birokrasi, sosialisasi dan pelaksanaan. Kerjasama pengelolaan pariwisata dilakukan dengan perjanjian yang mengatur semua pihak aka tetapi yang terjadi cenderung hanya sebatas kewajiban administratif. Untuk mengoptimalkan pengembangan pariwisata dilakukan upaya konkret dari pemerintah daerah untuk merumuskan program-program kerjasama yang dapat menarik partisipasi dari pihak swasta, masyarakat umum, akademisi dan media sehingga peran masing-masing aktor dapat diintegrasikan dalam pengembangan pariwisata.

Collaborative governance yang digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan partisipasi berbagai aktor dapat berkembang secara optimal sehingga memberikan manfaat yang dirasakan oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD), walaupun kalau dilihat dari jumlah wisatawan tidak begitu signifikan. Melalui kombinasi kekuatan, kepentingan, dan pengaruh, terdapat sekelompok pemangku kepentingan yang menyebabkan kolaborasi menjadi tidak seimbang. Beberapa pemangku kepentingan mendominasi manajemen dan yang lain terbatas pada peran pendukung dan bahkan mungkin pasif. Kondisi ini menghambat komunikasi antar pemangku kepentingan dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam berkolaborasi. Tata kelola kolaboratif secara konseptual ideal, tetapi dalam konteks tingkat pemangku kepentingan lintas sektoral yang berbeda.

Kerjasama pentahelix yang dijalin diawali dengan destinasi wisata sebagai inisiator, pengelola anggaran, dan penyusun kegiatan, sedangkan pemerintah sebagai mitra dan

regulator. Pengembangan desa wisata bertumpu pada kekuatan dan potensi lokal dan berorientasi pasar. Praktik-praktik tersebut bertujuan untuk mendorong pembangunan masyarakat dari bawah ke atas. Pada pengembangan pariwisata, terkadang masyarakat menerima manfaat pariwisata yang terbatas karena berbagai kendala, termasuk keterlibatannya yang tidak memadai dalam proses pengambilan keputusan dan implementasinya, aksesnya yang terbatas ke berbagai sumber daya, permintaan pariwisata yang rendah, dan tenaga kerja yang tinggi serta biaya lainnya. Daya tarik wisata dan partisipasi masyarakat mempengaruhi keputusan wisatawan dalam menentukan destinasi wisata di Kabupaten Magelang.

Pergeseran cara promosi ini terletak pada media yang digunakan dengan kecenderungan dilakukan melalui media online dibanding cara konvensional (*offline*) untuk tahun-tahun sekarang ini. Cara berpromosi ini sangat tepat digunakan melihat kecenderungan masyarakat jaman sekarang yang lebih banyak menggunakan sarana *gadget* untuk berselancar didunia maya melalui media sosial dan fasilitas *online* lainnya. Pariwisata berbasis masyarakat dan peran aktif masyarakat dalam mempromosikan wisata melalui pendekatan digital sangat berdampak dalam pengembangan potensi dan promosi pariwisata di Kabupaten Magelang. Bentuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yakni peningkatan pemasaran dan aksesibilitas, peningkatan mutu dan pelayanan. Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat berbentuk ide, dana, tenaga, keahlian.

Dalam perkembangannya, pemerintah sadar bahwa pariwisata perlu melibatkan kerjasama dengan instansi terkait. Tata kelola kolaboratif pariwisata dibentuk melalui kolaborasi yang luas dan adil antara aktor pemerintah dan non-pemerintah baik di dalam dan di luar destinasi. Dalam proses kolaborasi pengembangan pariwisata di Magelang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yaitu pemerintah, swasta, masyarakat, dan sebagainya. Kerjasama antara komunitas, pemerintah, pelaku usaha, akademisi dapat digunakan untuk meningkatkan promosi wisata. Pengembangan pariwisata dalam pelaksanaannya melibatkan pihak swasta agar pengembangan dan pembangunan di objek wisata dapat optimal.

Masing-masing *actor* dengan spesialisasi kemampuan akan melaksanakan tugasnya dengan optimal. Peran tersebut akan mendukung kualitas kolaborasi tata kelola pariwisata dan nantinya juga akan meningkatkan pemerataan kesejahteraan bersama. Pengembangan pariwisata diperlukan kemauan politik dari pemerintah untuk meningkatkan sistem koordinasi. Hubungan timbal balik antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat

dalam pengelolaan pariwisata dapat menjadi sangat kompleks karena masing-masing pemangku kepentingan memiliki kepentingan yang berbeda.

Kepemimpinan merupakan pendorong utama dalam kolaborasi sehingga mendukung kepercayaan dan komunikasi di antara pengusaha dan perwakilan badan publik. Untuk menerima umpan balik kritis, para pemangku kepentingan harus terus berkomunikasi satu sama lain. Perkembangan produk, pasar dan pemasaran di destinasi wisata telah coba dilakukan untuk berbagai destinasi wisata. Antara pemerintah dan masyarakat mempunyai peranan tersendiri. Partisipasi masyarakat berbentuk ide, dana, tenaga, keahlian. Instansi pemerintah melakukan penyuluhan dan pelatihan.

Pengembangan sektor pariwisata telah menjadi prioritas pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi daerah. Bentuk dan jenis potensi wisata yang beranekaragam telah dikembangkan dan dikelola dengan baik melalui *collaborative governance*. Dengan *collaborative governance*, upaya untuk meningkatkan partisipasi berbagai aktor pada destinasi wisata dapat berkembang secara optimal sehingga memberikan manfaat yang dirasakan oleh pemerintah daerah. Pengembangan pariwisata bertumpu pada kekuatan dan potensi lokal serta berorientasi pasar. Dalam pengembangan pariwisata perlu penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang, serta fasilitas lain seperti promosi, transportasi dan akomodasi dan pemasaran yang terpadu.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengembangan pariwisata di kabupaten Magelang dilakukan dengan mengikutkan berbagai aktor. *Collaborative governance* secara strategis dilakukan melalui dimensi structural birokrasi, sosialisasi dan pelaksanaan. Tata kelola pemerintahan yang inovatif dan revitalisasi meliputi empat komponen, yaitu kondisi awal, komitmen, desain kelembagaan, kondisi akhir (Sururi, 2018). Kerangka kerja Ansell dan Gash digunakan untuk identifikasi proses *collaborative governance* yang meliputi kepercayaan, komitmen, kepemimpinan, dan kelembagaan (Ansell & Gash, 2007).

Kepercayaan dan komitmen dapat dibangun dengan kuat melalui *Memorandum of Understanding (MoU)* yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Belum meratanya kualitas kolaborasi tata kelola pariwisata disebabkan oleh lemahnya penguatan bangunan kepercayaan antar para pihak *stakeholder* pariwisata untuk bersedia melakukan tata kelola pariwisata yang kolaboratif (Matthoriq et al., 2021). Pemahaman bersama dalam tata kelola pariwisata yang sudah terbangun diantara pihak *stakeholder* pariwisata, perlu dikembangkan bentuk pemahaman bersama yang lebih dapat mengakomodir kepentingan pihak *stakeholder*

pariwisata baik secara langsung dan tidak langsung. Strategi integrasi pengembangan objek wisata dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan pengembangan objek wisata. (Rahadyan, 2019). Adanya kolaborasi antara instansi terkait untuk mengembangkan pembangunan dan pariwisata untuk menarik wisatawan (Brata, 2019). pendekatan partisipatif kepada masyarakat perlu terus dilakukan agar inovasi kebijakan *Collaborative governance* memiliki nilai faktor dan dampak strategis (Sururi, 2018)

Komitmen Pemerintah Magelang untuk pengembangan pariwisata di daerahnya dilakukan melalui beberapa aksi. Upaya pemerintah daerah dan masyarakat dengan menghadirkan beragam jenis *icon* baru destinasi pariwisata berbasis masyarakat (*community based-tourism*) akan tetap *exist* dan *sustainable* dengan tersedianya sumberdaya masing-masing aktor. Pendekatan *collaborative governance* dapat digunakan sebagai alternatif solusi, khususnya dalam membangun tata kelola pariwisata yang kolaboratif guna memperkuat karakter destinasi wisata sekaligus bangunan *network* pariwisata. (Matthoriq et al., 2021). Komitmen para pihak *stakeholder* pariwisata untuk melakukan proses kolaborasi yang panjang dan kompleks menjadi tantangan yang belum dibangun bersama (Matthoriq et al., 2021). Keterlibatan *stakeholder* dalam *collaborative governance* pariwisata dapat dilihat dari kuantitas *actor* yang terlibat. Kesamaan visi, partisipasi, jejaring dan kemitraan antara *stakeholder* yang terlibat antara pemerintah, swasta dan masyarakat setempat akan memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan dalam pengelolaan operasional (Wiwin et al., 2020)

Kepemimpinan memainkan peran penting dalam memungkinkan proses kolaboratif dalam pariwisata di Magelang. Kepemimpinan merupakan faktor penting dalam *collaborative governance* (Bichler & Lösch, 2019). Sementara kepemimpinan yang kuat hadir di tingkat organisasi dan sebagian di tingkat destinasi, studi kasus destinasi kurang memiliki kepemimpinan di tingkat regional. Pada tingkat tujuan, kepemimpinan adalah pendorong utama *collaborative governance* yang mendukung kepercayaan dan komunikasi di antara pengusaha dan perwakilan badan publik. Para pemimpin menunjukkan komitmen yang kuat untuk proses kolaboratif karena mereka menyadari saling ketergantungan yang menjadi ciri industri pariwisata. Pemangku kepentingan harus terus berkomunikasi satu sama lain. Adanya hambatan dalam pelaksanaan *collaborative governance* dalam pariwisata maka perlu keseriusan dengan dibarengi komitmen yang tinggi dari para pejabat publik untuk menyelesaikan permasalahan sangat dibutuhkan. Faktor intensitas komunikasi dan koordinasi menjadi kata kunci agar dapat mengambil keputusan yang tepat.

Kelembagaan diperlukan dalam pengembangan pariwisata di Magelang. Pelaksanaan pengembangan pariwisata dilakukan oleh beberapa pihak sehingga perlu diatur peran dan pengorganisasiannya. Kerjasama pengelolaan pariwisata dilakukan dengan perjanjian yang mengatur semua pihak. Pada perjanjian tersebut harus tertulis pihak-pihak yang terlibat, tidak hanya beberapa pihak secara administratif. Apabila perjanjian tersebut tidak tertulis semua pihak maka pelaksanaan kolaborasi akan terhambat terkait dengan batasan peran (Mafaza & Setyowati, 2020). Adanya *MoU* terkadang masih mengalami berbagai hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan terkait dengan perencanaan dan sinergi kerjasama (Sururi, 2018)

Pengelolaan pariwisata tidak cukup mengandalkan pemerintah saja. pemerintah perlu berkolaborasi dengan pihak lainnya. Selain itu perlu adanya aturan yang jelas dari pihak desa adat sehingga masyarakat mempunyai peran yang jelas dalam pengelolaan (Yasinta, 2020). Pemerintah Kabupaten Magelang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Magelang Tahun 2014-2034. Kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, komunitas, pelaku swasta, pihak akademis, *Non-Governmental Organization (NGO)* dan lain sebagainya, merupakan kekuatan dalam mengembangkan potensi pariwisata yang ada (Rozikin et al., 2019). Adanya pola kerjasama dan komunikasi yang dibangun oleh pemerintah daerah dengan berbagai aktor diantaranya pihak swasta, masyarakat, akademisi dan media (Kirana & Artisa, 2020). Implementasi kolaborasi pentahelix dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan dengan melibatkan unsur akademik, bisnis, komunitas, pemerintah, media (Rosardi et al., 2021). Masyarakat juga diberdayakan melalui kelompok-kelompok sadar wisata yang ada di masing-masing desa wisata.

Masing-masing aktor memiliki kontribusi sesuai dengan perannya masing-masing. Hubungan timbal balik antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat diperlukan dalam pengelolaan pariwisata (Pujiyono et al., 2019). Hubungan tersebut menjadi sangat kompleks karena masing-masing pemangku kepentingan memiliki kepentingan yang berbeda. *collaborative governance* perlu adanya kerjasama untuk memudahkan proses kolaborasi antar pemangku kepentingan di berbagai sektor ekonomi dan sosial. (Barandiarán et al., 2019). Perjuangan untuk merumuskan pendekatan tata kelola kolaboratif pariwisata masyarakat yang adil dan efektif dapat membawa manfaat sosial ekonomi yang positif bagi desa dan komunitas pedesaan lainnya (Keyim, 2018). Beberapa praktik kelembagaan yang tidak memuaskan terjadi dalam pengembangan pariwisata.

Collaborative governance dapat berjalan dengan baik dengan ditandai para *stakeholder* sudah menjalankan tugas pokoknya secara maksimal berdasarkan 8 indikator kolaborasi dari DeSeve diantaranya *networked structure, commitment to a common purpose, trust among the participants, governance, access to authority, distributive accountability/responsibility, information sharing, dan access to resources* (DeSeve, 2007). Untuk dapat lebih menegaskan maka perlu secara administratif dalam perjanjian kerjasama tidak hanya mengatur seluruh *stakeholder* terkait sehingga dapat menjelaskan keterlibatan *stakeholder* (Mafaza & Setyowati, 2020).

Collaborative governance dalam pengembangan pariwisata perlu adanya dukungan regulasi secara penuh bagi seluruh *stakeholder* terkait. Pengembangan pariwisata diperlukan upaya konkret dari pemerintah daerah untuk merumuskan program-program kerjasama sehingga peran masing-masing aktor dapat diintegrasikan (Kirana & Artisa, 2020). Perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik di bidang pariwisata melalui penciptaan ruang interaksi formal mendukung pengembangan pariwisata (Barandiarán et al., 2019). Keberhasilan kolaborasi adalah kondisi yang ditawarkan oleh daerah untuk menjalin hubungan kerjasama. Kondisi ini memudahkan proses kolaborasi antar pemangku kepentingan di berbagai sektor ekonomi dan sosial. Selain itu pendekatan partisipatif kepada masyarakat perlu terus dilakukan agar inovasi kebijakan *Collaborative governance* memiliki nilai faktor dan dampak strategis.

Pengelolaan pariwisata tidak menjadi tugas pemerintah semata. Pengelolaan kepariwisataan kini tidak lagi dapat dibebankan hanya kepada salah satu *actor* sesuai dengan *good tourism governance* (Matthoriq et al., 2021). Semakin banyak *actor* yang terlibat akan meningkatkan pengelolaan pariwisata dengan baik. Dalam proses kolaborasi melibatkan seluruh pemangku kepentingan yaitu pemerintah, swasta, masyarakat, dan sebagainya. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, komunitas, pelaku swasta, pihak akademis, *NGO* dan lain sebagainya, merupakan kekuatan dalam mengembangkan potensi pariwisata yang ada.

Kepemimpinan memainkan peran penting dalam memungkinkan proses kolaboratif dalam pariwisata (Bichler & Lösch, 2019). Kepemimpinan memainkan peran penting dalam memungkinkan proses kolaboratif dalam pariwisata (Bichler & Lösch, 2019). Pemerintah daerah dan masyarakat harus dapat menghadirkan beragam jenis ikon baru destinasi pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*). Pada saat ini banyak negara telah berupaya mengemas pariwisata yang dapat memberikan perbedaan dan daya saing yang kuat terhadap negara-negara lain, yaitu melalui dasar pola pengembangan pada sektor

budaya dan kearifan local atau *Indigenous Tourism* (Rozikin et al., 2019). Pengembangan desa wisata harus bertumpu pada kekuatan dan potensi lokal serta berorientasi pasar. Dalam pengembangan desa wisata perlu penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang, serta fasilitas lain seperti promosi, transportasi dan akomodasi dan pemasaran yang terpadu.

Tata kelola kolaboratif diperlukan untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan di masa mendatang. Model tata kelola kolaboratif destinasi wisata menciptakan hubungan yang harmonis antara pemangku kepentingan yang terlibat. (Wiwin et al., 2020). Model pariwisata berkelanjutan melibatkan dimensi sosial, ekonomi, ekologi, budaya, dan pendidikan. Agrowisata berkomitmen untuk menjadi wahana wisata keluarga, wisata dinas, dan *study tour* dengan mengutamakan eduwisata dan memberikan wawasan ekologis (Rosardi et al., 2021). Wisata berkelanjutan yang diterapkan berpotensi meningkatkan pendapatan atau omzet baik bagi perusahaan maupun masyarakat sekitar. Keunikan sebagai penunjang daya tarik Agrowisata untuk dapat selalu berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. Pembangunan wisata berkelanjutan merupakan salah satu penerapan *sustainable development goals* untuk menciptakan pariwisata yang ramah lingkungan dan mengurangi tingkat pengangguran masyarakat setempat. Kawasan ekowisata dengan potensi yang dimiliki dapat dikembangkan karena wilayah yang masih alami dan menyuguhkan pemandangan alam yang sangat indah dan menarik. (Sugiharti & Sari, 2020)

Mengubah *mindset* wisata tidak lagi berpusat pada satu tempat semata, tetapi pariwisata berbasis *landscape* budaya dan masyarakat di sekitarnya. Sehingga daerah sekitar perlu berbenah dengan berbagai program pembangunan pendukung dalam rangka menangkap peluang pengembangan ekonomi untuk meningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat (Sofianto, 2018). Promosi pariwisata dilakukan khususnya dengan komunikasi pemasaran kepariwisataan untuk meningkatkan lama kunjungan wisatawan. Daya tarik wisata dan partisipasi masyarakat mempengaruhi keputusan wisatawan dalam menentukan destinasi wisata di Kabupaten Magelang. Pariwisata berbasis masyarakat dan peran aktif masyarakat dalam mempromosikan wisata melalui pendekatan digital sangat berdampak dalam pengembangan potensi dan promosi pariwisata (Muliawanti & Susanti, 2020). Pergeseran cara promosi ini terletak pada media yang digunakan dengan kecenderungan dilakukan melalui media online dibanding cara konvensional (*offline*) karena kecenderungan masyarakat jaman sekarang yang lebih banyak menggunakan sarana *gadget* untuk berselancar didunia maya melalui media sosial dan fasilitas *online* lainnya (Susilo & Yulianto, 2018)

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat melalui peningkatan pemasaran dan aksesibilitas serta peningkatan mutu dan pelayanan. Pelayanan prima sangat dibutuhkan oleh masyarakat (Hanafi, 2020). Faktor pendorong dalam pengembangan objek wisata adalah tingkat kedatangan wisatawan yang meningkat setiap tahunnya karena lokasi tempat wisata yang strategis dan berdekatan satu sama lain (Rahadyan, 2019). Model pengembangan alternatif dengan melibatkan masyarakat. Kolaborasi antara instansi terkait dibutuhkan untuk pembangunan dan pariwisata melalui peningkatan promosi wisata untuk menarik wisatawan (Brata, 2019). Dalam meningkatkan sector wisatawan, di butuhkan publikasi dalam media sosial daya tarik media sosial sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia sekarang (Surya, 2021). Media sosial bagaikan teknologi informasi yang cepat dan akurat guna meningkatkan daya tarik pengunjung sehingga menaikkan wisatawan dan mempengaruhi sector keberlanjutan wisata. Berbagai jenis dukungan (misalnya, dukungan pemasaran, subsidi bisnis, dan pelatihan keterampilan kejuruan) dari aktor negara dan non-negara untuk mengembangkan bisnis (Keyim, 2018).

Intensitas komunikasi dan koordinasi menjadi kata kunci agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Dalam pelaksanaan *collaborative governance* tersebut, dibutuhkan komunikasi yang efektif untuk memudahkan para aktor melakukan kolaborasi sehingga dapat mengoptimalkan perannya dalam pengembangan desa wisata. Selain itu koordinasi antar pemangku kepentingan untuk berpartisipasi secara penuh agar tercipta kolaborasi dengan kapasitas prosedural, kepemimpinan, pengetahuan, dan sumber daya. Pesatnya perkembangan pariwisata harus diiringi dengan pemerataan kesejahteraan dan keberlanjutan pembangunan kepariwisataan. Masyarakat juga harus lebih dilibatkan dalam pembangunan prasarana tambahan seperti kios dan lainnya sehingga masyarakat sekitar bisa mendapatkan pendapatan lebih.

KESIMPULAN

Collaborative governance dalam pengembangan pariwisata di Magelang terselenggara dengan memperhatikan aspek kepercayaan, komitmen, kepemimpinan, dan kelembagaan. Kepercayaan antar pihak terkait menjadi awal terbentuknya komitmen untuk melaksanakan kerjasama. Dalam *collaborative governance* perlu kepemimpinan yang memimpin berjalannya proses kolaborasi. Wujud dari *collaborative governance* maka perlu adanya kelembagaan dalam pengelolaan pariwisata. Keberhasilan *collaborative governance* sangat dipengaruhi oleh regulasi, pemetaan *stakeholder*, peran *stakeholder*, dan komunikasi yang

terjalin antar *stakeholder*. Regulasi akan memudahkan menentukan *stakeholder* beserta perannya dan menciptakan komunikasi yang baik antar *stakeholder*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Najjar, B. (2014). Corporate governance, tourism growth and firm performance: Evidence from publicly listed tourism firms in five Middle Eastern countries. *Tourism Management*, 42. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2013.09.008>
- Alfiandri, A., Prasajo, E., & Salomo, R. V. (2021). COLLABORATION OF MARINE ECOTOURISM IN RIAU ISLANDS PROVINCE TOWARDS SUSTAINABLE TOURISM. *Advances in Social Sciences Research Journal*, 8(3). <https://doi.org/10.14738/assrj.84.9798>
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Baggio, R., & Cooper, C. (2010). Knowledge transfer in a tourism destination: The effects of a network structure. *Service Industries Journal*, 30(10). <https://doi.org/10.1080/02642060903580649>
- Barandiarán, X., Restrepo, N., & Luna, Á. (2019). Collaborative governance in tourism: lessons from Etorikizuna Eraikiz in the Basque Country, Spain. *Tourism Review*, 74(4). <https://doi.org/10.1108/TR-09-2018-0133>
- Beaumont, N., & Dredge, D. (2010). Local tourism governance: A comparison of three network approaches. *Journal of Sustainable Tourism*, 18(1). <https://doi.org/10.1080/09669580903215139>
- Beritelli, P., & Bieger, T. (2014). From destination governance to destination leadership - defining and exploring the significance with the help of a systemic perspective. *Tourism Review*, 69(1). <https://doi.org/10.1108/TR-07-2013-0043>
- Bichler, B. F. (2021). Designing tourism governance: The role of local residents. *Journal of Destination Marketing and Management*, 19. <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2019.100389>
- Bichler, B. F., & Lösch, M. (2019). Collaborative governance in tourism: Empirical insights into a community-oriented destination. *Sustainability (Switzerland)*, 11(23). <https://doi.org/10.3390/su11236673>
- Borges, M. do R., Eusébio, C., & Carvalho, N. (2014). Governance for sustainable tourism: A review and directions for future research. *European Journal of Tourism Research*, 7(1). <https://doi.org/10.54055/ejtr.v7i.139>
- Bramwell, B. (2011). Governance, the state and sustainable tourism: A political economy approach. In *Journal of Sustainable Tourism* (Vol. 19, Issues 4–5). <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.576765>
- Bramwell, B., & Lane, B. (2011). Critical research on the governance of tourism and

- sustainability. In *Journal of Sustainable Tourism* (Vol. 19, Issues 4–5). <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.580586>
- Bramwell, B., & Sharman, A. (1999). Collaboration in local tourism policymaking. *Annals of Tourism Research*, 26(2). [https://doi.org/10.1016/S0160-7383\(98\)00105-4](https://doi.org/10.1016/S0160-7383(98)00105-4)
- Brata, E. A. (2019). Mendut and Pawon Temples Tourism Development Model in Magelang Regency. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 2(3). <https://doi.org/10.15294/efficient.v2i3.35907>
- DeSeve. (2007). *Creating Managed Networks as a Response to Societal Challenges*. IBM Center for the Business of Government.
- Duadji, N., & Tresiana, N. (2020). SUSTAINABLE TOURISM: WHY DO GOVERNMENT NEED COLLABORATIVE GOVERNANCE? *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 107(11). <https://doi.org/10.18551/rjoas.2020-11.21>
- Erkuş-Öztürk, H., & Eraydin, A. (2010). Environmental governance for sustainable tourism development: Collaborative networks and organisation building in the Antalya tourism region. *Tourism Management*, 31(1). <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.01.002>
- Fung, A. (2015). Putting the Public Back into Governance: The Challenges of Citizen Participation and Its Future. *Public Administration Review*, 75(4). <https://doi.org/10.1111/puar.12361>
- Garrod, B., Fyall, A., Leask, A., & Reid, E. (2012). Engaging residents as stakeholders of the visitor attraction. *Tourism Management*, 33(5). <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2011.11.014>
- Hakim, M. A., & Fafurida, F. (2018). Studi Pariwisata Kabupaten Magelang, Kota Surakarta dan Kota Semarang Beserta Strategi Pengembangannya. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 1(2). <https://doi.org/10.15294/efficient.v1i2.27617>
- Hanafi, M. (2019). Peranan Administrasi Kepegawaian Pada Sekolah Menengah Kejuruan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *EFISIENSI - KAJIAN ILMU ADMINISTRASI*, 15(1). <https://doi.org/10.21831/efisiensi.v15i1.24486>
- Hanafi, M. (2020). PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MELALUI EFEKTIVITAS CONTENT WEBSITE. *EFISIENSI - KAJIAN ILMU ADMINISTRASI*. <https://doi.org/10.21831/efisiensi.v17i2.30486>
- Iain T. Christie & D. Elizabeth Crompton. (2003). Republic of Madagascar : Tourism Sector Study. *Republic of Madagascar: Tourism Sector Study.*, 63(63).
- Iman Pribadi, T., Suganda, D., & Saefullah, K. (2021). PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN: TINJAUAN PUSTAKA. *Jurnal Sosial Sains*, 1(2). <https://doi.org/10.36418/sosains.v1i2.34>
- Indonesia, R. (2009). UU No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. *UU*, 2(5).

- Keyim, P. (2016). Tourism and rural development in western China: A case from Turpan. *Community Development Journal*, 51(4). <https://doi.org/10.1093/cdj/bsv046>
- Keyim, P. (2018). Tourism Collaborative Governance and Rural Community Development in Finland: The Case of Vuonislanti. *Journal of Travel Research*, 57(4). <https://doi.org/10.1177/0047287517701858>
- Kirana, C. A. D., & Artisa, R. A. (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1). <https://doi.org/10.26618/kjap.v6i1.3119>
- Mafaza, A., & Setyowati, K. (2020). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1). <https://doi.org/10.31258/jkp.11.1.p.7-12>
- Matthoriq, M., Zauhar, S., & Hermawan, R. (2021). Collaborative Governance dalam Tata Kelola Pariwisata-Desa (Studi Pariwisata-Desa “Bumiaji Agrotourism” di Kota Wisata Batu). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 007(01). <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2021.007.01.3>
- Muliawanti, L., & Susanti, D. (2020). Digitalisasi Destinasi sebagai Strategi Pengembangan Promosi Pariwisata di Kabupaten Magelang. *Warta ISKI*, 3(02). <https://doi.org/10.25008/wartaiski.v3i02.53>
- Nelson, L. S. (1998). Introduction to the special issue on governance. *The Social Science Journal*, 35(4). [https://doi.org/10.1016/s0362-3319\(98\)90021-0](https://doi.org/10.1016/s0362-3319(98)90021-0)
- Pechlaner, H., Kozak, M., & Volgger, M. (2014). Destination leadership: A new paradigm for tourist destinations? *Tourism Review*, 69(1). <https://doi.org/10.1108/TR-09-2013-0053>
- Pechlaner, H., Ruhanen, L., Scott, N., Ritchie, B., & Tkaczynski, A. (2010). Governance: a review and synthesis of the literature. In *Tourism Review* (Vol. 65, Issue 4). <https://doi.org/10.1108/16605371011093836>
- Presenza, A., Abbate, T., & Micera, R. (2015). The Cittaslow Movement: Opportunities and Challenges for the Governance of Tourism Destinations. *Tourism Planning and Development*, 12(4). <https://doi.org/10.1080/21568316.2015.1037929>
- Pujiyono, B., Kismartini, Yuwono, T., & Dwimawanti, I. H. (2019). Stakeholder analysis on tourism collaborative governance in Tanjung Lesung tourism, Pandeglang Regency, Banten Province, Indonesia. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 8(3).
- Rahadyan, G. H. (2019). Development Strategy of Tourism Object in Borobudur, Magelang District. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 2(2), 404–412. <https://doi.org/10.15294/efficient.v2i2.30799>
- Robertson, P. J. (2011). An assessment of collaborative governance in a network for sustainable tourism: The case of redeturis. *International Journal of Public Administration*, 34(5). <https://doi.org/10.1080/01900692.2010.550078>
- Rosardi, R. G., Prajanti, S. D. W., Atmaja, H. T., & Juhadi. (2021). Sustainable tourism

- model in pagilaran tea plantation agrotourism, in Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 16(5). <https://doi.org/10.18280/ijstdp.160519>
- Roxas, F. M. Y., Rivera, J. P. R., & Gutierrez, E. L. M. (2020). Mapping stakeholders' roles in governing sustainable tourism destinations. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 45. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2020.09.005>
- Rozikin, M., Wismanu, R. E., & Muttaqin, A. (2019). MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM ANALISIS PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA BERBASIS INDIGENOUS TOURISM. *MEDIA BINA ILMIAH*, 14(4). <https://doi.org/10.33758/mbi.v14i4.345>
- Selin, S. (2017). Elaborating the role of backbone leadership organizations in sustainable tourism development: The Monongahela River Valley Coalition. *Sustainability (Switzerland)*, 9(8). <https://doi.org/10.3390/su9081367>
- Sofianto, A. (2018). STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA NASIONAL BOROBUDUR. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 16(1), 28–44. <https://doi.org/10.36762/litbangjateng.v16i1.745>
- Stoffelen, A., Ioannides, D., & Vanneste, D. (2017). Obstacles to achieving cross-border tourism governance: A multi-scalar approach focusing on the German-Czech borderlands. *Annals of Tourism Research*, 64. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2017.03.003>
- Sugiharti, R. R., & Sari, K. (2020). STRATEGI PENGEMBANGAN EKOWISATA DI SUB 1 A PADA KAWASAN SAUJANA LEMBAH MERAPI MERBABU MAGELANG. *Gorontalo Journal of Forestry Research*, 3(2), 64. <https://doi.org/10.32662/gjfr.v3i2.1040>
- Sururi, A. (2018). COLLABORATIVE GOVERNANCE SEBAGAI INOVASI KEBIJAKAN STRATEGIS (STUDI REVITALISASI KAWASAN WISATA CAGAR BUDAYA BANTEN LAMA). *HUMANIKA*, 25(1). <https://doi.org/10.14710/humanika.v25i1.18482>
- Surya, I. . S. N. . H. A. S. . & N. N. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Wisata Berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo (Studi Kasus: Wisata Kebun Teh Nglingsgo). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* , 6(2).
- Susilo, P., & Yulianto, A. (2018). Langkah Promosi Objek Wisata Daerah Untuk Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Pada Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Magelang. *Khasanah Ilmu - Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 9(2). <https://doi.org/10.31294/khi.v9i2.5230>
- Valente, F., Dredge, D., & Lohmann, G. (2015). Leadership and governance in regional tourism. *Journal of Destination Marketing and Management*, 4(2). <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2015.03.005>
- van der Zee, E., Gerrets, A. M., & Vanneste, D. (2017). Complexity in the governance of tourism networks: Balancing between external pressure and internal expectations. *Journal of Destination Marketing and Management*, 6(4). <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2017.07.003>

- Volgger, M., & Pechlaner, H. (2014). Requirements for destination management organizations in destination governance: Understanding DMO success. *Tourism Management, 41*. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2013.09.001>
- Volgger, M., & Pechlaner, H. (2015). Governing networks in tourism: what have we achieved, what is still to be done and learned? *Tourism Review, 70*(4). <https://doi.org/10.1108/TR-04-2015-0013>
- Wagner, O., & Peters, M. (2009). Can association methods reveal the effects of internal branding on tourism destination stakeholders? *Journal of Place Management and Development, 2*(1). <https://doi.org/10.1108/17538330910942807>
- Wiwin, W., Ardika, W., & Putra, N. (2020). Collaborative Governance: As a Conceptual Model of Destination Management in the Besakih Temple Area, Karangasem Regency, Bali Province. *JOURNAL OF TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT, 8*(1). <https://doi.org/10.15640/jthm.v8n1a8>
- Yasinth, P. N. (2020). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DI KABUPATEN GIANYAR. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 4*(1). <https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2219>

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu terwujudnya penelitian dan artikel ini. Terima kasih kepada editor dan reviewer jurnal yang membantu proses penerbitan artikel ini.

PROFIL PENULIS

Penulis lahir di Temanggung pada 25 Oktober 1991. Penulis menempuh pendidikan dasar sampai menengah di Temanggung. Kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Diponegoro pada Jurusan Administrasi Publik. Pendidikan magister juga ditempuh di Universitas Diponegoro pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi. Saat ini penulis menjadi pengajar di Jurusan Pendidikan Administrasi, Universitas Negeri Yogyakarta. ORCID ID 0000-0002-7246-0378, Google Scholar 0000-0002-7246-0378, Sinta: 6022758.